

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari sebagian kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, baik itu lembaga keuangan dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan *Baitul maal wa Tamwil* (BMT).

Sebagai cikal-bakal berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang lalu. Pendirian BMI ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), walaupun keberadaan dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat lapisan bawah. (Heri sudarsono, 2004: 32)

Secara umum keberadaan kedua lembaga keuangan di atas kebanyakan ditujukan untuk kalangan menengah dan atas, sementara itu untuk pengusaha kalangan kecil sangat sulit untuk mendapatkan pembiayaan dalam melanjutkan ataupun memulai usaha mereka, karena hanya sedikit bank umum yang melayani pengusaha di kalangan itu. Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. (Yusuf Qardhawi, 1997:35)

Namun Yusuf Qardhawi (1997:33) menyebutkan pula bahwa ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik.

Pada tahun 2005, di Bank Muamalat Indonesia (BMI) batas terendah dalam mengajukan pembiayaan adalah sebesar lima puluh juta rupiah.¹ Tentu hal ini sangat menyulitkan bagi para pelaku pengusaha kecil. Apabila mereka selalu kesulitan dalam memperoleh pembiayaan untuk modal usaha tentunya. Hal ini akan berpengaruh pada proses pertumbuhan usaha.

Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut BMT, di mana keberadaan lembaga keuangan ini adalah lebih banyak ditujukan untuk pengusaha kalangan kecil. Keberadaan BMT diharapkan akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha pada kalangan tersebut pada tahun 2001.



¹www.muamalatbank.com

Tabel 1.1
Kinerja keseluruhan BMT nasional
Di bawah koordinasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)
untuk tahun 2001

(Dalam Rupiah)

NO	KEGIATAN	POSISI KINERJA
1	MODAL	Rp 503.815.879.064
2	Dana pihak ketiga	Rp 501.639.061.849
3	Pembiayaan	Rp 500.522.926.041
4	Asset	Rp 521.070.607.254
5	Nasabah	810.187.506 orang
6	Nasabah pembiayaan	520.770.486 orang

Sumber: Bank syariah

Berdasarkan dari tabel tersebut data yang tercatat oleh Pinbuk jumlah BMT di Indonesia mencapai 2938. dari jumlah tersebut 2402 unit BMT secara aktif menyampaikan laporan mereka ke PINBUK. BMT-BMT yang aktif ini diketahui kinerjanya. (Muhammad, 2006: 137)

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: (1) kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan, (2) kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. (Muhammad Ridwan, 2006: 1)

Baitul maal Wattamwil (BMT) ialah kelompok masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BMT mempunyai dua keutamaan yang menjadikannya sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah pedesaan). *Pertama*, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (qardhul hasan) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya modal pinjaman ini maka BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/ pembiayaan).

Kedua, kelebihan konsep bagi hasil adalah adanya profit and loss sharing (bagi hasil/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

BMT Masjid Agung Sumedang memiliki komitmen dalam upaya pemberdayaan umat dalam bidang ekonomi, khususnya terhadap para pengusaha mikro, kecil, dan menengah juga yang berusaha dalam sektor informal. BMT Masjid Agung Sumedang berupaya untuk dapat lebih meningkatkan eksistensinya, baik dengan meningkatkan kualitas pelayanannya, jenis produknya, maupun sistemnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Masjid Agung Sumedang adalah produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

Tabel 1.2

Jumlah pembiayaan pada bulan oktober

Pembiayaan	2005	2006
Murabahah	Rp. 236.500	
BBA	Rp. 3.738.800	Rp. 28.698.468
Musyarakah	Rp. 250.000	Rp. 12.056.200
Al Qardul Hasan		Rp. 50.000
Rahn		
Total Pembiayaan	Rp. 4.225.300	Rp. 40.804.668

(Laporan Keuangan BMT Masjid Agung Sumedang)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil mendominasi seluruh pembiayaan dengan perbandingan angka mencapai jumlah lebih dari 60% dari total pembiayaan yang ada di BMT Masjid Agung Sumedang.

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah sistem bagi hasil ini kurang diminati oleh nasabah pembiayaan BMT Masjid Agung Sumedang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Pembiayaan
BMT Masjid Agung Sumedang
Oktober s.d. Desember 2006

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Pembiayaan	Okt.	Nop.	Des.
1	Mudharabah			15.000.000
2	Musyarakah	12.056.200	20.973.760	19.663.760
3	Bai'bitsaman Ajil	28.695.468	31.962.922	84.742.390
4	Qardul hasan	50.000	50.000	50.000
	Jumlah	40.801.668	52.986.682	119.456.150

Sumber: Laporan Keuangan Neraca BMT Masjid Agung Sumedang

Dari tabel tersebut dapat dilihat dominasi pembiayaan BBA (Ba'i Bitsaman Ajil) terhadap pembiayaan yang lainnya. Ba'i Bitsaman Ajil merupakan salah satu produk pembiayaan dengan sistem margin, sedangkan mudharabah dan musyarakah merupakan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dengan kata lain, pembiayaan dengan sistem margin cenderung lebih disukai dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **"PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BA'I BITSAMAN AJIL PADA BMT MASJID AGUNG SUMEDANG."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Masjid Agung Sumedang;
2. Bagaimana mekanisme perhitungan harga jual pada pembiayaan Bai Bitsaman Ajil yang diberikan kepada nasabah;
3. Bagaimana perkembangan pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil pada BMT Masjid Agung Sumedang;

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis guna menyusun laporan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar ahli madya (Amd).

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Masjid Agung Sumedang
2. Untuk mengetahui Perhitungan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil yang diberikan kepada nasabah
3. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil pada BMT Masjid Agung Sumedang

1.4 Manfaat penelitian

Dengan tercapainya sasaran dan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang bermanfaat bagi :

1. Peneliti, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin ilmu dalam menghadapi berbagai masalah dilapanagn khususnya masalah yang sesuai dengan Program Studi Manajemn Keuangan Syari'ah
2. BMT, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam menjalankan usahanya.
3. Peneliti lain, yaitu merupakan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan maupun informasi untuk penelitian lebih lanjut serta pihak lain yang berkepentingan dengan BMT yang diteliti.

1.5 Kerangka Berpikir

BMT adalah lembaga yang mempunyai dua peran. Pertama, BMT berperan sebagai Baitul Maal yaitu fungsi lembaga yang menghimpun dana menyalurkan ZIS atau wakaf. Dalam hal ini BMT mempunyai visi sosial, tidak mengharapkan laba. Kedua, BMT berfungsi sebagai lembaga bisnis yang membantu mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil serta menengah melalui produk pembiayaannya. Dari fungsi kedua inilah BMT memperoleh profit.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Dari pembiayaan yang disalurkan, BMT memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut tergantung dari prinsip pembiayaan yang dipakai. Ada empat prinsip pembiayaan yang ada dalam BMT, yaitu:

1. Pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip jual beli
3. Pembiayaan berdasarkan Prinsip sewa
4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip jasa

Dari keempat jenis produk tersebut yang paling penting adalah prinsip bagi hasil. Karena konsep bagi hasil memiliki kelebihan yaitu adanya profit and loss sharing (bagi hasil/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

Tetapi sistem bagi hasil ini tidak bisa dipakai dalam pemenuhan barang-barang konsumtif. Hal tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sistem jual beli. Hal itu pula yang terjadi dalam BMT Masjid Agung. Banyak nasabah yang lebih memilih

pembiayaan dengan prinsip jual beli (pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil) dibandingkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).²

Bai' Bitsaman Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu diatas 1 tahun (*long run financing*). (K. Perwataatmadja & Syafi'i Antonio, 1992:27)

Bai' Bitsaman Ajil adalah kontrak murabahah dimana barang yang diperjualbelikan tersebut, diserahkan dengan segera sedangkan harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya pada BMT sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Bai' Bitsaman Ajil mempunyai dasar hukum atau landasan syariah seperti dicantumkan dalam Al Quran surat Al baqarah: ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....." (QS. Al-Baqarah:275) (soenarjo, 1990:127)

² Lihat tabel 1.2

1.6 Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai analisis isi dan analisis data sekunder yaitu analisis yang digunakan dalam bidang ekonomi terhadap jumlah data yang tersedia.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Masjid Agung Sumedang yang berada di Jl. Masjid No. 03 (Sebelah Selatan Areal Masjid Agung Sumedang)

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian tugas Akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang sedang di hadapi.

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu tentang pengaruh pembiayaan terhadap kondisi aktiva lancar BMT Masjid Agung Sumedang.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini penge ola dan data dari BMT Masjid Agung Sumedang.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti, surat kabar, majalah, dan literatur lainnya yang ada kaitannya denga pokok masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan (Observasi), yaitu dilakukan untuk mengetahui dengan pasti kondisi yang terjadi di lokasi penelitian yaitu BMT Masjid Agung Sumedang.
- b. Wawancara (Interview), yaitu untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang masalah yang sedang diteliti.

5. Studi Literatur (Literature Review)

Studi literatur yaitu menghimpun data-data informasi dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

6. Jenis Data

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yaitu berupa penalaran-penalaran logis terhadap data-data yang didapatkan di BMT Masjid Agung Sumedang.

7. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan-tahapan kategori dan klasifikasi, perbandingan dan pencairan hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah.

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua sumber data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Melakukan klasifikasi terhadap data yang terkumpul sesuai masalah yang diteliti.

- c. Menghubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis.

